

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA KEMBANG KERANG  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Bayu Idaman Nusantara

NPP. 28.0994

*Asdaf Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat*

*Program Studi Keuangan Daerah*

Email: bayuidaman28@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement (GAP):** One of the objectives of establishing BUMDes is to increase the village's original income. But for now this goal cannot be fulfilled due to the Covid-19 pandemic or what is also known as the corona virus. Therefore, it is necessary to implement the digitization of BUMDes in the era of the Covid-19 pandemic. **Purpose:** This study was to determine and analyze the implementation of digitization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the era of the Covid-19 pandemic in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. **Method:** This study is a descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. **Result:** The findings showed that only of all BUMDes of East Lombok Regency only BUMDes Bina Sejahtera belonging to Kembang Kerang Village implemented the Bumdes Digital platform. This is because there are still indicators that have not been met, namely insufficient budget, inadequate Bumdes management, network availability, shipping costs that increase product prices. **Conclusion:** the implementation of the digitization of village-owned businesses has not gone well because only one village has implemented it, this is due to the unpreparedness of the village and the lack of facilities and infrastructure. Researchers suggest that the implementation of the digital bumdes platform by Bumdes Bina Sejahtera should be appreciated because it is an example for other villages, improving the recruitment process for bumdes management, socializing and educating the benefits of using digital bumdes, holding a meeting of the management of village-owned enterprises to overcome obstacles in implementing the digitalization of village-owned enterprises.

**Keywords:** BUMDes, Implementation, Digital, Covid-19

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** Pendirian BUMDes ini adalah salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun untuk saat ini tujuan tersebut belum bisa terpenuhi disebabkan oleh pandemi covid-19 atau yang juga dikenal dengan virus corona. Oleh karena itu dibutuhkannya implementasi digitalisasi BUMDes di era pandemi covid-19. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di era pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa hanya dari seluruh BUMDes Kabupaten Lombok Timur hanya BUMDes Bina Sejahtera milik Desa Kembang Kerang yang menerapkan platform Bumdes Digital. Hal ini dikarenakan masih ada indikator yang belum terpenuhi yaitu Anggaran yang tidak mencukupi, pengelola Bumdes yang kurang cakap, ketersediaan jaringan, biaya pengiriman yang menambah harga produk. **Kesimpulan:** Implementasi digitalisasi bumdes ini belum berjalan dengan baik karena hanya satu desa yang sudah menerapkan bumdes digital tersebut, hal ini diakibatkan ketidaksiapan Desa serta sarana dan prasarana. Peneliti menyarankan penerapan platform bumdes digital oleh Bumdes Bina Sejahtera patut diapresiasi karena menjadi contoh bagi desa lain, perbaikan proses rekrutmen pengurus bumdes, sosialisasi dan edukasi terkait keuntungan menggunakan bumdes digital, mengadakan rapat pengurus bumdes untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan Bumdes Digital.

**Kata Kunci:** BUMDes, Implementasi, Digital, Covid-19

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada desa terus-menerus mengalami peningkatan, hanya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018. Pemerintah pusat sudah menunjukkan keseriusannya dalam upaya mengembangkan daerah pinggiran sejalan dengan Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Konsep smart-city yang menghubungkan sistem pelayanan masyarakat terpadu kedalam satu aplikasi digital, konsep tersebut juga banyak digunakan negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Manfaat nyata yang dirasakan dari sistem ini yaitu pemangkasan jalur birokrasi serta biaya administrasi publik. Menurut Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono yang diterima Lombokita.com menuturkan “Digital Village bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian di tingkat Desa, mulai dari bagaimana mutu dan kualitas tanam, pengolahan produk, hingga ke jaringan pemasaran”.

Perkembangan zaman mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi kedalam dunia digital. Melihat cepatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan sekaligus pintu memasuki pasar bebas. Contoh kecil komoditas rumput laut asal Jepang atau benih jagung Amerika berkualitas, dapat dengan mudah dibeli melalui aplikasi platform digital, handphone. *Digital village* dapat memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penampung hasil produksi di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes. Home industri yang terintegrasi dengan Bumdes, selain bisa memasarkan produk hasil pertanian, juga bisa mendukung sektor kerajinan, seperti Tenun dan Gerabah di Lombok.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki prospek perkembangan pertanian berbasis digital yang bisa menjadi potensi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat bahwa selain keperluan kesehatan dan pangan, biaya pulsa merupakan salah satu konsumsi masyarakat di desa. Artinya, masyarakat pedesaan sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Setidaknya, masyarakat pedesaan menggunakannya untuk jejaring media sosial.

Tujuan utama pembangunan desa diantaranya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan secara merata. Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan desa merupakan bagian dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **1.2 Permasalahan**

Pandemi covid-19 telah menyebabkan perubahan yang dramatis baik di bidang perencanaan maupun penganggaran. Pandemi ini tak hanya membuat pembangunan terhambat, pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi akan menjadi salah satu sumber anggaran turut terkena dampak. Akibatnya, seperti sekarang ini seluruh target pencapaian yang telah dirancang oleh pemerintah mengalami penurunan.

Jika imbas pandemi ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam skala besar. masalah ini akan berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.

Kondisi di masa pandemi ini, membuat pelaku UMKM mengalami kendala, hal itu lantaran ada usaha mereka yang harus terhenti karena tidak adanya pesanan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberlakukan larangan warga untuk keluar rumah apalagi berkerumunan untuk mencegah terjadinya penularan. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya pelanggan karena tidak ada transaksi secara langsung. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pandemi ini menyebabkan pelaksanaan BUMDes menjadi mati suri. Banyaknya BUMDes di Lombok Timur yang masih menggunakan sistem manual tentu menjadi masalah yang cukup berat, dikarenakan hal ini akan menjadi penghambat proses digitalisasi ini. Maka dari itu pemerintah mesti melakukan percepatan pada digitalisasi ini, pemerintah Lombok Timur harus segera melakukan registrasi ulang guna mendaftarkan seluruh Badan Usaha desa yang masih aktif. Proses *input* data ini akan menghabiskan waktu cukup lama mengingat besarnya jumlah Badan Usaha Milik Desa yang belum terdaftar kedalam sistem digital ini. Ditambah lagi dengan banyaknya data yang harus dimasukkan seperti scan buku kas umum, regulasi desa/perdes, adart BUMDes dan beberapa item lainnya.

Permasalahan baru yang muncul ketika berbicara tentang teknologi adalah kemampuan dari pengelola BUMDes yang belum memiliki kompetensi untuk mengurus program BUMDes yang modern. Pemberdayaan pengelolaan BUMDes dalam pemanfaatan teknologi digital marketing tentunya harus dijalankan oleh orang yang profesional dalam bidang IT, sehingga pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan aparat desa yang mengelola BUMDes.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun dalam konteks pemasaran produk dengan sistem *digital marketing*. Penelitian Monika dan Ira berjudul strategi bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandemi covid-19 (Monika & Ira, 2020), menemukan bahwa BUMDes Karya Mandiri tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 melalui kearifan lokal dan digitalisasi usaha meskipun terjadi penurunan omzet usaha sampai dengan 33%. Penelitian Putri Nugrahaningsih, dkk. menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mengalami beberapa kendala dalam hal produksi dikarenakan adanya keterbatasan modal mesin produksi dan saluran pemasaran produk yang belum menggunakan media digital.

tim pengabdian melakukan pendampingan berupa kegiatan literasi tentang informasi digital melalui pelatihan digital marketing dengan media sosial dan desain produk masker di masa pandemi sebagai langkah memupuk jiwa kewirausahaan (Nugrahaningsih, 2021). Penelitian Putu Krisna, dkk. Terkait pemberdayaan pengelola BUMDes berdaya melalui implementasi digital marketing system menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berbasis digitalisasi marketing berjalan baik yang dibuktikan dengan cukup signifikannya penjualan produk unggulan seperti beras hitam, jaje sarana upacara keagamaan seperti gina, uli dan bahkan hingga mampu mensuplai ke tingkat perusahaan daerah milik Kabupaten Tabanan (Putu Krisna, 2020). Penelitian Indra Permana menunjukkan temuan dari model struktural telah membuktikan hampir semua hubungan variabel yang dihipotesiskan terbukti terdukung. Hasil penelitian membuktikan bahwa terhadap pengaruh positif orientasi kewirausahaan pada kinerja usaha. Terdapat pengaruh teknologi digital kewirausahaan pada kinerja usaha. Terdapat pengaruh motivasi usaha pada kinerja usaha (Indra Permana, 2020). Penelitian Riris dan Renny terkait pemasaran produk BUMDes berbasis *online* melalui aplikasi *market place* yang dimiliki yaitu Elektronik Bumdes Sugihwaras (E-Bes), dan menemukan bahwa sampai sekarang penggunaannya belum maksimal, sebab banyak masyarakat Desa Sugihwaras belum mengetahui adanya aplikasi tersebut, ketertarikannya hanya 40% saja (Riris & Renny, 2021).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi digitalisasi badan usaha milik desa, menggunakan indikator yang berbeda-juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III (Winarno, 2012) yang menyatakan bahwa implementasi memiliki 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana implementasi digitalisasi badan usaha milik desa di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif, dan penulis menggunakan *simple random sampling*. Penulis dalam hal ini melakukan peninjauan terhadap suatu objek yang diteliti dengan menyatakan suatu pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus tersebut.

Untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan program studi penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.

Penulis melakukan analisis data untuk dijabarkan agar mudah dipelajari dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Komunikasi**

##### **a) Transmisi**

Proses penerapan bumdes digital telah dilakukan sosialisasi terkait manfaat serta kemudahan yang akan diperoleh oleh masyarakat apabila sudah berjalan. Penyusunan rencana pemanfaatan bumdes digital ini melalui musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pengelola BUMDes, BPD, Ketua RT, Lembaga Desa dan Tokoh masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bekerja sama dengan Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diketahui bahwa dari jumlah total desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur baru BUMDes yang berada di Kembang Kerang yang menggunakan platform BUMDes digital, ia mengatakan bahwa untuk penerapan bumdes digital ini pihak pemerintah memilih BUMDes Bina Sejahtera yang berada di Desa Kembang Kerang sebagai *pilot project* dalam langkah awal. Kembang Kerang menjadi Desa percontohan bagi desa-desa lainnya. Desa lain belum diberikan pelatihan lebih lanjut terkait digitalisasi BUMDes karena belum memiliki kemampuan seperti sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program BUMDes digital.

##### **b) Kejelasan**

Point penting dari materi menuju Bumdes Digital yang disampaikan Lalu Muhammad Irwan, S.Sos selaku Sekretaris DPMD yakni: **a)** Pemahaman tentang jenis usaha dan sistem pemasaran, **b)** Mindset digital, **c)** Bumdes Digital dengan diparkannya sejumlah contoh Kabupaten/Kota yang sukses dalam penerapan Digitalisasi Bumdes di Indonesia, **d)** Kemudian terkait Branding Bumdes, **e)** Teknik menentukan dan meriset Produk serta menargetkan pasar, dan **f)** Terakhir tentang beberapa skill digital.

Dari penuturan Sekretaris DPMD diatas kita ketahui bahwa dengan adanya petunjuk teknis serta materi untuk menuju BUMDes Digital yang disampaikan perangkat desa dan pengelola BUMDes tidak mengalami simpang siur dalam menjalankan kegiatannya sebab sudah ada pedoman yang bisa diikuti.

##### **c) Konsistensi**

Berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditentukan, digunakan sebagai dasar untuk penerapan Digitalisasi BUMDes. Dalam proses penerapan Digitalisasi BUMDes ini dilakukan oleh beberapa pihak yang saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan.

Hasil wawancara dengan Kasi Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pendapatan Asli Desa menuturkan bahwa desa masih sering terkendala dalam pembuatan SPJ Bumdes yang akan dilaporkan ke Dinas PMD. Yang seharusnya SPJ dilaporkan pada bulan Januari, pihak desa justru melakukan keterlambatan hingga bulan Maret. Kejadian ini biasa terjadi ketika telah mendekati waktu pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Pengurus bumdes terkesan menyepelkan.

#### **3.2 Sumber Daya**

##### **a) Sumber Daya Manusia**

Data dari wawancara yang dilakukan bersama Pengelola BUMDes Bina Sejahtera di Kembang Kerang tersebut diketahui bahwasanya perekrutan pengurus bumdes tahun ini masih dalam proses penyusunan. kualifikasi dari masing-masing pengelola tergolong

masih cukup kurang, disebabkan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pengelola Badan usaha Milik Desa (Bumdes), dalam rangka menghadapi persaingan dan tantangan di era Digital.

Peningkatan kapasitas SDM ini diwujudkan dengan kembali digelar pelatihan dengan materi menuju Bumdes Digital dan materi penguatan kelembagaan dan transparansi keuangan Bumdes. Dengan adanya pelatihan ini tentunya diharapkan pengurus bumdes mendapat *upgrade* skill dan pengetahuan.

#### **b) Fasilitas**

Pada penelitian yang dilakukan penulis menemukan sarana dan prasarana di Kantor Desa Kembang Kerang bahwa jumlah kondisi komputer yang dalam keadaan baik dan bisa digunakan hanya ada 2.

**Tabel 4.3**  
**Sarana Kantor Desa Kembang Kerang 2020**

<b>No.</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Jumlah (Buah)</b>
1.	Meja tulis kantor desa	Baik	8
2.	Meja mesin tulis	Baik	2
3.	Meja Rapat	Baik	8
4.	Meja/ kursi tamu	Baik	1
5.	Lemari kayu	Baik	2
6.	Mesin tulis/tik	Baik	2
7.	Kursi kayu	Baik	10
8.	Mesin hitung/kalkulator	Baik	2
9.	Komputer	Baik	2
10.	Sepeda Motor	Baik	2

Sumber : Data Monografi Desa Kembang Kerang (diolah penulis)

Tentu saja jumlah tersebut tidak cukup jika komputer digunakan untuk menajalankan platform BUMDes digital bergantian dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan komputer menjadi sangat penting karena menjadi mesin untuk beralih ke sistem digital. Kekurangan unit yang tersedia akan menghambat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat.

#### **c) Sumber Daya Informasi**

Hasil wawancara dengan Manajer/pengeloal Bumdes menyampaikan bahwa pengurus bumdes sudah memposting produk ke aplikasi dan sudah bisa diakses oleh siapapun termasuk masyarakat desa, namun kebanyakan produk yang baru diposting yaitu produk-produk yang diperoleh dari grosiran. Untuk produk olahan asli desa sendiri baru beberapa saja yang di publish. Pengurus Bumdes berjanji akan memposting lebih banyak lagi produk asli desa. Belum semua pembuat makanan ataupun pengrajin yang mendaftarkan

produknya ke dalam Bumdes. Sehingga produk yang diunggulkan oleh desa masih minim.

#### **d) Wewenang**

Keterangan yang diberikan Bapak Yahya Putra, S.Pd selaku Kepala Desa Kembang Kerang bahwa dalam pelaksanaan bumdes digital telah diberikan wewenang kepada manajer Bumdes dan anggotanya untuk mengurus dan mengelola agar kegiatan perekonomian desa Kembang Kerang tetap berjalan. Mereka yang telah ditunjuk harus menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Pembagian tugas ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan, pembagian ini juga dilakukan agar setiap orang bertanggungjawab atas pekerjaannya masing-masing.

### **3.3 Disposisi**

Kepala Desa Kembang Kerang menuturkan dana insentif dimasukkan dalam perencanaan anggaran ditujukan untuk memberikan dana tambahan bagi pelaksana kegiatan bumdes digital, hal tersebut dilakukan agar pengurus bumdes merasa mendapat penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan begitu diharapkan kinerja dan hasilnya dapat meningkat seiring dengan pemberian dana insentif tersebut. Prospek dengan adanya dana insentif tersebut para pelaksana yang mengelola BUMDes digital bisa meningkatkan kinerjanya hingga maksimum dan memperoleh tujuan yang diinginkan yaitu mendongkrak perekonomian dimasa pandemi.

### **3.4 Struktur Birokrasi**

Pencanang Bumdes digital mempunyai tugas dan peran sesuai dengan tingkatan dan lembaga/organisasi yang dijalankan. Secara umum pelaksana program bumdes digital terdiri dari :

#### **1. Kemendes-PDPT**

Sosialisasi terkait bumdes digital di Lombok Timur telah dilakukan melalui musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pengelola Bumdes, BPD, Ketua RT, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat. Pengenalan ini bertujuan menyampaikan manfaat dan kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat jika bumdes digital telah berjalan.

#### **2. DPMD dan BAPPEDA**

Dua dinas/badan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, mengarahkan dan mengawasi tentang tugas yang perlu ditaati masing-masing pengelola BUMDes sesuai dengan petunjuk teknis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Dinas PMD penulis mendapatkan fakta dilapangan bahwa Dinas PMD yang berkoodinasi dengan BAPPEDA telah memberikan pengarahan dan pembinaan terkait pemanfaatan bumdes digital di Kabupaten Lombok Timur. Hanya saja untuk pelaksanaan penerapan Bumdes Digital masih terkendala akibat kurangnya dana pemerintah daerah untuk membiayai program tersebut.

#### **3. Desa**

Desa yang merupakan sasaran dalam pelaksanaan program Digitalisasi BUMDes, dan kepala desa telah menunjuk manajer bumdes sebagai pengelola yang memiliki tugas untuk menerima, menyalurkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan penerapan bumdes digital. Fakta dilapangan menunjukkan ketidaksiapan dari desa-desa lain

dalam pelaksanaan bumdes digital, hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Dinas PMD. Kekurangan sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam penerapan platform bumdes digital tersebut.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi digitalisasi BUMDes seharusnya membawa angin segar dalam perekonomian masyarakat sekaligus menjadi alternatif perniagaan. Implementasi BUMDes berbasis digital ini juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat pedesaan untuk melek terhadap perkembangan zaman khususnya internet. Penulis menemukan kendala berupa hasil produksi yang susah terjual karena pemasaran secara konvensional tidak bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Sama halnya dengan temuan Putri Nugrahaningsih bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mengalami beberapa kendala dalam hal produksi dikarenakan adanya keterbatasan modal mesin produksi dan saluran pemasaran produk yang belum menggunakan media digital. Tim pengabdian melakukan pendampingan berupa kegiatan literasi tentang informasi digital melalui pelatihan digital marketing dengan media sosial dan desain produk masker di masa pandemi sebagai langkah memupuk jiwa kewirausahaan (Nugrahaningsih, 2021).

Kendala yang terjadi dalam implementasi digitalisasi BUMDes ini tidak terlepas dari kurang cakupannya sumberdaya manusia yang dimiliki, ketidaktahuan staf/pelaksana dalam pengoperasian teknologi berupa platform digital inilah yang membuat bumdes berbasis digital ini tidak dapat terlaksana. Hal ini sejalan dengan penelitian Riris dan Renny terkait pemasaran produk BUMDes berbasis *online* melalui aplikasi *market place* yang dimiliki yaitu Elektronik Bumdes Sugihwaras (E-Bes), dan menemukan bahwa sampai sekarang penggunaannya belum maksimal, sebab banyak masyarakat Desa Sugihwaras belum mengetahui adanya aplikasi tersebut, ketertarikannya hanya 40% saja (Riris & Renny, 2021).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi digitalisasi badan usaha milik desa di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Anggaran yang tidak mencukupi, sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi bumdes digital ini. Perihal implementasi digitalisasi BUMDes ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi dan digital. Guna meningkatkan peran BUMDes dalam perekonomian masyarakat, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah pemasaran produk BUMDes serta melakukan sosialisasi yang lebih masih terhadap keuntungan yang diperoleh jika menggunakan sistem jual beli secara online.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian

lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program implementasi digitalisasi BUMDes di Kabupaten Lombok Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas DPMD Lombok Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar, S. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purnomo. (2004). *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur: Makalah BPMPD.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSDP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Simangunsong, (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soemantri, Gumilar (2012). *Prosedur Alih Media (Digitalisasi) Arsip*.Pdf.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surmayadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama Pertama. Jakarta: Binapura Aksara.
- Syaukani. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Jakarta : Yogya Pustaka.